



Hubungan Italia dengan Uni Eropa di Bawah Kepemimpinan Giorgia Meloni

Deborah Ecclesia Shacharit Sinaga

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia, deborah21001@mail.unpad.ac.id

*Corresponding Author: deborah21001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *This research explores Italy's relationship with the European Union under the leadership of Prime Minister Giorgia Meloni. Meloni's nationalist stance on immigration, fiscal governance, and Eurozone issues is analyzed, emphasizing her efforts to balance national priorities with engagement in key European issues. Italy, under Meloni, maintains strong support for EU cooperation on border control but faces concerns from European leaders regarding its right-wing orientation. The study aims to comprehensively analyze historical, cultural, and social factors influencing Italy's integration into the EU, assessing the impact of Meloni's leadership on alignment with EU policies. It delves into challenges in Italy's relations with the EU, including migration policies and economic cooperation, providing insights for policymakers to navigate Italy's position within the complex European landscape. Meloni's leadership, marked by strategic communication and a nationalistic approach, reflects her commitment to a strong, independent Italy within the EU framework, shaping Italy's role in addressing shared challenges on the European stage.*

Keywords: *Communication and Leadership, Eurozone Governance, Giorgia Meloni, Italy-European Union Relations, Nationalism and Immigration.*

Abstrak: Kajian ini mendalami hubungan Italia dengan Uni Eropa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Penulis menganalisis pendirian nasionalis Meloni dalam masalah imigrasi, pemberlakuan pajak, dan masalah Eurozone, secara khusus berfokus pada upayanya dalam menyamaratakan prioritas negara dengan isu-isu prioritas UE. Di bawah kepemimpinan Meloni, Italia mempertahankan dukungan yang kuat untuk kerjasama EU dalam pengendalian perbatasan namun juga menghadapi kekhawatiran dari pemimpin-pemimpin Eropa lainnya dikarenakan orientasi politik Meloni yang bersayap kanan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sejarah, budaya, dan sosial yang mempengaruhi integrasi Italia dengan UE secara komprehensif, menimbang dampak kepemimpinan Meloni dengan penetapan kebijakan-kebijakan UE. Kajian ini juga memahami tantangan yang Italia hadapi dalam hubungannya dengan UE, termasuk juga kebijakan migrasi dan kooperasi ekonomi, memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan untuk memahami posisi Italia di tengah-tengah kompleksitas UE. Kepemimpinan Meloni, ditandai dengan komunikasi yang strategis dan pendekatan yang nasionalis, menggambarkan komitmennya untuk membangun

Italia yang lebih independen di tengah-tengah kerangka kerja UE, dan bersamaan juga membentuk peran Italia dalam penyelesaian masalah Eropa.

Kata Kunci: Hubungan Italia-Uni Eropa, Giorgia Meloni, Imigrasi dan Nasionalisme, Komunikasi dan Kepemimpinan, Pemerintahan Eurozone.

PENDAHULUAN

Italia telah menjadi anggota pendiri Uni Eropa (UE) sejak tahun 1957 dan selalu mendukung proses integrasi Eropa, karena menganggapnya penting dalam mendorong perdamaian, kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat Italia dan Eropa pada umumnya (MAECI, 2023; UE, 2023). Italia telah memainkan peran utama dalam membentuk proses integrasi UE dan telah menjadi tuan rumah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah komunitas tersebut, seperti penandatanganan Perjanjian EEC dan Euratom di Roma pada tahun 1957 (Solfrini, 2019). Namun, ketidaklengkapan “Eropasasi” atau integrasi penuh Italia ke dalam UE disebabkan oleh faktor sejarah, budaya, dan sosiologis (Fabbrini & Zgaga, 2019). Meskipun demikian, Italia tetap menjadi pendukung kuat integrasi Eropa dan tidak berniat meninggalkan UE.

Giorgia Meloni adalah pemimpin partai sayap kanan Brothers of Italy saat ini dan perdana menteri wanita pertama di Italia. Ideologi politik dan prioritas kebijakan luar negerinya telah berkembang seiring waktu dan dia digambarkan sebagai politisi pragmatis yang mendekati konservatisme Anglo-Saxon (Wilkenfeld, 2023). Pembelaan Meloni terhadap perbatasan Italia dari imigran berakar pada sikap nasionalismenya, dan dia kritis terhadap penanganan krisis migrasi yang dilakukan UE (Paolucci, 2023). Namun, ia juga telah mencalonkan Antonio Tajani, mantan Presiden Parlemen Eropa yang berhaluan tengah, sebagai Menteri Luar Negeri, dan ia telah bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengonfirmasi aliansi Prancis-Italia mengenai isu-isu penting Eropa saat ini, seperti energi dan Ukraina (Paolucci, 2023).

Di bidang ekonomi, Meloni menentang kebijakan penghematan (austerity) dan mendukung negara yang lebih intervensionis, sesuai dengan akar budayanya dan ekspektasi para pemilih tradisionalnya, yang sebagian besar berasal dari wilayah selatan dan sektor publik (Wilkenfeld, 2023). Dalam kebijakan luar negeri, ia bersikap kritis terhadap penanganan krisis migrasi yang dilakukan UE dan menyerukan peran Italia yang lebih tegas di Mediterania (Kirby, 2022). Retorika Meloni tentang UE menempatkannya dekat dengan pemimpin nasionalis Hongaria Viktor Orban, dan sekutunya memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Namun, ia juga berjanji untuk memerintah “untuk semua orang” dan berusaha meyakinkan mitra Italia di Eropa bahwa pemerintahannya tidak akan mengkhianati kepercayaan masyarakat (Kirby, 2022).

Dengan demikian, ideologi politik dan prioritas kebijakan luar negeri Giorgia Meloni bersifat kompleks dan terus berkembang. Meskipun ia sering dikaitkan dengan posisi-posisi sayap kanan dan nasionalis, ia juga menunjukkan pendekatan pragmatis terhadap pemerintahan dan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan mitra-mitra Eropa dalam isu-isu utama. Sikapnya terhadap integrasi dan kerja sama Eropa masih menjadi bahan perdebatan, dan kepemimpinannya di partai sayap kanan Italia telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pemimpin Eropa.

Prioritas utama Italia di Uni Eropa (UE) telah diidentifikasi oleh Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR) sebagai imigrasi dan suaka, tata kelola fiskal dan zona euro, serta polisi perbatasan dan penjaga pantai bersama (Solfrini, 2019). Prioritas-prioritas ini konsisten dengan komitmen historis Italia terhadap integrasi Eropa dan perannya sebagai anggota pendiri UE (MAECI, 2023). Namun, di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni, pemimpin

partai sayap kanan Italia saat ini, pendirian negara tersebut terhadap prioritas-prioritas ini menjadi lebih kompleks dan kontroversial.

Di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni, kebijakan fiskal dan tata kelola zona euro Italia telah menunjukkan sikap Eurorealis, sejalan dengan pendekatan pemerintahan kanan-tengah sebelumnya. Meskipun menyatakan preferensi yang kuat terhadap pandangan antarpemerintah mengenai Eropa, pemerintahan Meloni telah beroperasi dalam kerangka peraturan dan tata kelola UE (Goretti, 2023). Dalam hal kebijakan ekonomi, undang-undang anggaran tahun 2023, meskipun ada beberapa langkah yang kontroversial, sebagian besar memenuhi harapan Brussel, yang menunjukkan komitmen terhadap kehati-hatian fiskal dan kepatuhan terhadap rekomendasi UE (Goretti, 2023; Amaro, 2023).

Adapun pemerintah Italia telah melakukan upaya untuk melanjutkan penyesuaian fiskal secara bertahap, menyelaraskan kebijakan fiskalnya dengan rekomendasi UE, meskipun tidak ada peraturan mengikat UE yang masih ditangguhkan (Amaro, 2023). Pendekatan ini mencerminkan sikap pragmatis terhadap tata kelola fiskal dan zona euro, yang berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan pertimbangan ekonomi Eropa yang lebih luas. Meskipun kebijakan pemerintah terkadang menghadapi skeptisisme dan kekhawatiran, terutama dalam konteks reaksi pasar, keseluruhan perkembangannya menunjukkan komitmen untuk mengarahkan tata kelola fiskal dan zona euro Italia sesuai dengan parameter peraturan dan ekspektasi UE (Amaro, 2023).

Terkait imigrasi dan suaka, Meloni mengambil sikap yang lebih nasionalis, menekankan perlunya mempertahankan perbatasan Italia dan mengkritik cara UE menangani krisis migrasi (Solfrini, 2019). Ia juga bersikap kritis terhadap tata kelola fiskal dan zona euro UE, menentang penghematan dan mendukung negara yang lebih intervensionis (Varvelli, 2023). Namun, Meloni juga berupaya untuk terlibat dengan mitra-mitra Eropa dalam isu-isu penting, seperti pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengonfirmasi aliansi Perancis-Italia di bidang energi dan Ukraina (Solfrini, 2019).

Dalam hal kesamaan polisi perbatasan dan penjaga pantai, Italia merupakan pendukung kuat bagi kerja sama dan koordinasi yang lebih besar di antara negara-negara anggota UE untuk mengatasi tantangan migrasi dan keamanan perbatasan (MAECI, 2023). Namun, kepemimpinan Meloni di partai sayap kanan Italia telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa pemimpin Eropa mengenai komitmen negara tersebut terhadap prioritas-prioritas ini dan pendiriannya yang lebih luas terhadap integrasi dan kerjasama Eropa (Solfrini, 2019).

Oleh karena itu, prioritas utama Italia di UE konsisten dengan komitmen historisnya terhadap integrasi Eropa dan perannya sebagai anggota pendiri komunitas tersebut. Namun, di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni, pendirian negara tersebut terhadap prioritas-prioritas ini menjadi lebih kompleks dan kontroversial, yang mencerminkan perkembangan lanskap politik di Italia dan Eropa.

Maka penelitian tentang hubungan Italia dengan UE di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni ini menjadi topik penting dan relevan untuk dipahami secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis rinci tentang faktor sejarah, budaya, dan sosial Italia yang mempengaruhi integrasinya ke dalam UE, serta proses “Eropanisasi” yang tidak sepenuhnya terjadi dan berdampak pada kemampuan Italia untuk sepenuhnya menyelaraskan diri dengan kebijakan dan inisiatif UE serta kapasitasnya untuk terlibat secara efektif dalam kerja sama dan proses pengambilan keputusan Eropa khususnya di bawah kepemimpinan Meloni.

Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki tantangan hubungan Italia di Eropa, termasuk kebijakan migrasi, kerja sama ekonomi, dan perlunya kolaborasi yang lebih luas untuk mengatasi berbagai permasalahan bersama lainnya. Penelitian ini juga akan memberikan pemahaman komprehensif tentang posisi Italia terhadap kebijakan UE, perkembangan kebijakan luar negeri Italia di bawah kepemimpinan Meloni, dan implikasi

dinamika kepemimpinannya terhadap kerja sama Italia, UE, dan by proxy negara-negara Eropa lainnya. Penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menentukan hubungan Italia dengan UE serta untuk mendorong kerja sama dan kolaborasi dalam mengatasi tantangan bersama di kawasan Eropa.

METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode riset kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif sendiri adalah sebuah metode riset dalam penelitian yang secara mendasar bergantung kepada persepsi terhadap manusia dan merupakan suatu riset yang bersifat eksploratif. Metode ini bertentangan dengan metode kuantitatif yang melibatkan pengukuran suatu ciri tertentu. Penelitian kualitatif akan menghasilkan suatu penemuan yang tidak bisa dihasilkan dengan cara perhitungan, pengukuran, dan kuantifikasi. Dalam jenis penelitian ini, objektif yang utama merupakan interpretasi dan pembentukan yang mendalam dan luas atas suatu fenomena dan dikaji melalui fakta, realita, serta studi empiris yang terjadi dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif ini biasanya mencoba untuk memahami arti dari sebuah masalah sosial atau kemanusiaan yang dianggap oleh sejumlah individu dan kelompok.

Melalui metode ini, penulis mencoba untuk menitikberatkan pendekatan deskriptif analitis untuk mengenali dan mengidentifikasi peristiwa yang akan diangkat. Dalam proses pelaksanaan penelitian ini pula, penulis akan mencoba untuk mengikutsertakan berbagai upaya penting yang menjadi bagian dari metode kualitatif itu sendiri, seperti pengumpulan data secara detail kemudian penganalisaan data-data. Secara umum, penelitian kualitatif ini biasanya digunakan untuk menelisik kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku manusia, aktivitas sosial masyarakat, dan masih banyak lagi. Sering kali penelitian kualitatif digunakan sebagai alat untuk memahami makna tersirat dan tersembunyi dibalik suatu fenomena yang sulit untuk dipahami. Hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini merupakan data deskriptif yang berwujud uraian dan tulisan dari fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif sendiri biasanya akan meneliti sebuah fenomena yang juga kualitatif. Seperti misalnya ketika sedang menyelidiki perilaku manusia dan motif yang mendasari perilaku tersebut. Karena itulah menurut penulis, untuk menyelidiki fenomena mengenai hubungan Italia dengan Uni Eropa di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni, dibutuhkan pendekatan kualitatif. Hal ini karena penulis dapat mencari sumber data melalui literatur-literatur di media maupun buku, dan metode tersebut lah yang sangat mempermudah penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semangat dan kontribusi Giorgia Meloni dalam politik memang telah dimulai sejak ia masih muda. Sebelum memimpin partai Fratelli d'Italia, Meloni sendiri telah terlibat dalam gerakan pemuda sayap kanan seperti Fronte della Gioventù dan Alleanza Nazionale, keanggotaan yang kemudian dipertanyakan karena berbagai kontroversi yang berkaitan dengan pernyataan dan opini yang tidak jarang diafiliasikan kepada doktrin fasis. Seiring waktu, dia menunjukkan kemampuan organisasi partai yang sangat baik dan keterampilan kepemimpinan politik yang luar biasa. Melalui kemampuan komunikasinya yang luar biasa, ia memperoleh pengalaman dan popularitas dalam pandangan politik Italia. Dia berhasil pertama kali menjadi anggota parlemen pada tahun 2006, dan kemudian menjadi Menteri Pemuda pada tahun 2008 dalam pemerintahan Berlusconi IV dengan partai Il Popolo della Libertà.

Pengalaman di masa mudanya merupakan masa yang sangat signifikan bagi Giorgia Meloni. Dia memanfaatkan jejaring sosial lokal untuk memperluas jumlah pemilihnya, dengan fokus pada kontak langsung dengan pemilih dan membuat komunikasi mudah diakses

oleh semua orang. Selain itu, ia sering berpartisipasi dalam program hiburan televisi, debat, dan wawancara, yang membuatnya lebih dekat dengan para pengikutnya. Dia juga aktif di platform sosial utama seperti Instagram, Twitter, dan Facebook.

Popularitasnya juga semakin signifikan setelah ia melakukan tindakan oposisi yang sangat keras kepada pemerintahan Perdana Menteri sebelumnya, Mario Draghi selama pandemi Covid-19. Giorgia Meloni melalui posting-postingnya di profil Facebook telah menciptakan saluran propaganda dengan nada-nada yang keras. Hal ini pada akhirnya menarik simpati masyarakat selama krisis Covid-19 karena masyarakat umumnya merasa bahwa Meloni memberikan suara atas kebutuhan masyarakat pada saat itu. Selain itu, narasi yang kadang-kadang romantis namun tidak berlebihan yang bertujuan membuat warga Italia merasa diwakili oleh Giorgia Meloni sebagai seorang perempuan, seorang pekerja, dan seorang politikus Italia, turut berkontribusi pada karirnya.

Meskipun begitu, sejak terpilih sebagai Perdana Menteri Italia pada 22 Oktober 2022 yang lalu, Meloni memang memperoleh begitu banyak polemik hingga dinamika yang ia peroleh dari rasa ketidakpercayaan warga terhadap partai-partai tradisional. Selama masa kepemimpinannya sendiri, Meloni cenderung melakukan sedikit perubahan terkait dengan gaya kepemimpinannya pasca-pandemi Covid-19. Jika sebelumnya gaya kepemimpinan ditandai dengan wujud strategi komunikasi yang sederhana dan informal, Meloni cenderung mengubah gaya komunikasi politiknya menjadi lebih intim dan membumi. Ia juga cenderung memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk merangkul masyarakat lokal hingga masyarakat global.

Pendekatan Giorgia Meloni dalam berpolitik yang memanfaatkan konsep komunikasi politik yang tepat juga menjadi sudut pandang yang sangat menarik. Konsep komunikasi politik umumnya merujuk kepada pertukaran informasi dan konten dalam lingkungan masyarakat lewat proses komunikasi yang tepat. Karena karakternya yang berbasis pada kompleksitas 'hubungan', komunikasi politik memiliki karakteristik dan asumsi yang sama dengan komunikasi secara umum. Komunikasi politik mungkin terkesan sepele, padahal komunikasi politik sangat berperan penting dalam menggambarkan kehidupan sosial setiap manusia, dapat diuraikan dalam berbagai aspek (Mazzoleni, 2012).

Para pelaku utama dalam komunikasi politik termasuk sistem politik yang dituju, yang mengacu pada keseluruhan institusi politik, terutama partai-partai dan pemimpin mereka; sistem media, yang secara ringkas melibatkan berbagai lembaga media dalam produksi dan penyebaran pengetahuan; dan pemilih, yang mewakili individu atau pendapat publik, terutama saat fokus pada audiens (Ceccarini, 2015).

Penjelasan dari Giampiero Mazzoleni (2019) menggambarkan komunikasi politik sebagai gabungan antara dunia informasi dan dunia institusi, yang mencakup partai politik dan pemimpin mereka. Ini mencakup ranah publik dan sfera publik, aspek-aspek penting dalam komunikasi politik dalam konteks demokratis di mana individu, atau lebih luas lagi warga, membentuk pandangan dan pemahaman mereka berdasarkan berbagai sumber yang mudah diakses, yang sering tercermin dalam agenda politik dan partai-partai yang terdapat dalam sistem politik (Habermas, 1962).

Pendekatan komunikasi strategis Giorgia Meloni, yang sangat menekankan pada nilai-nilai tradisional, persatuan nasional, dan kepemimpinan yang berwibawa, tidak hanya menjadi basis pendekatannya di dalam negeri tetapi juga menjadi landasan dari pendekatannya ke dalam kebijakan luar negeri Italia. Strategi komunikasi ini sejalan sepenuhnya dengan sikapnya terhadap kepentingan internasional, yang mana ia memprioritaskan prinsip kedaulatan nasional, pembinaan identitas nasional yang kuat, dan peningkatan kepentingan Italia di panggung global. Namun, penting untuk dicatat bahwa Meloni juga kerap menyelaraskan kepentingan tersebut agar berjalan bersamaan dengan posisi Italia terhadap Uni Eropa.

Naratif yang konsisten yang disampaikan melalui saluran komunikasinya tidak hanya beresonansi di dalam negeri, tetapi juga secara rapi terhubung dengan pandangannya terhadap kebijakan luar negeri. Dalam pendekatannya terhadap hubungan global, Meloni memperjuangkan Italia yang tangguh dan mandiri, menjaga otonomi negara dan menegaskan kedaulatannya dalam lanskap kompleks urusan internasional.

Sentuhan nasionalis yang jelas dalam gaya komunikasinya, tercermin melalui wacananya tentang nilai-nilai tradisional dan persatuan, bergema jelas dalam strategi kebijakan luar negerinya. Ini menegaskan komitmennya untuk menjaga identitas unik Italia dan melindungi kepentingan nasionalnya sambil secara aktif terlibat dengan kepentingan Uni Eropa. Keselarasan antara narasi komunikasinya dan pandangannya terhadap kebijakan luar negeri menunjukkan visi yang koheren terhadap peran Italia dalam uni Eropa, visi yang berakar dalam perlindungan kedaulatan dan proyeksi identitas negara yang khas di tengah dinamika global. Hal tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada pola-pola hubungan dan posisi Italia terhadap kebijakan-kebijakan Uni Eropa di berbagai segmen, mulai dari politik, sosial-budaya hingga ekonomi.

Posisi Italia terhadap Kebijakan Uni Eropa

Setelah memperoleh jabatan perdana menteri Italia, Giorgia Meloni pada awalnya kerap memperoleh kekhawatiran dalam tubuh Uni Eropa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula der Leyen, Uni Eropa tidak akan segan memberikan konsekuensi kepada Italia jika negara tersebut berupaya menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai UE (Jucca, 2023). Namun, dengan mengejutkan dewan Uni Eropa justru terkejut dengan perilaku Meloni yang justru mampu menjalankan kepemimpinan dengan standar demokrasi dan selaras dengan nilai-nilai Uni Eropa.

Meloni sendiri berhasil meyakinkan pihak Uni Eropa bahwa ia akan memprioritaskan komitmen Italia terhadap UE dan NATO pada isu agresi Rusia di Ukraina. Hal tersebut sangat jauh berbeda dari ekspektasi dewan-dewan Uni Eropa (Jucca, 2023). Dalam pidatonya, bahkan Melone menegaskan bahwa "menyerah pada pemerasan Putin terkait energi tidak akan menyelesaikan masalah". Maka dari itu, tidak mengherankan apabila Meloni disebut-sebut telah berhasil melampaui para pemimpin sebelumnya.

Meloni juga berhasil memperkuat hubungannya dengan Uni Eropa melalui kunjungannya ke Brussels dan pertemuan dengan pejabat UE segera setelah ia menjabat. Analisis politik Massimo Franco mengatakan bahwa Meloni, perdana menteri perempuan pertama Italia, berhasil mengalahkan Salvini dan Berlusconi serta memperoleh kemerdekaan. Franco menyatakan bahwa ketakutan tentang demokrasi Italia "terlalu dibesar-besarkan" dan bahwa Meloni adalah penjamin konstitusi. Jelas bahwa komitmen terhadap proyek integrasi Eropa merupakan isu fundamental bagi dimensi konstitusional Italia.

Meskipun latar belakang politik Meloni dan akar partainya mengandung elemen-elemen nostalgik dari Benito Mussolini, Meloni berargumen bahwa mereka memiliki visi yang sangat berbeda. Pernyataan Meloni tentang apa yang terjadi di Roma yang diduduki Nazi mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sejarah (Birinci, 2023).

Di masa kepemimpinannya, Meloni juga memperoleh warisan beberapa masalah dari pemerintahan sebelumnya. Secara garis besar, sikap diplomasi Italia telah dibentuk oleh dua set pengaruh yang saling bertabrakan. Di satu sisi, terdapat harapan yang muncul dari perannya dalam kerangka multilateral seperti UE dan NATO, serta persepsi dan harapan terkait peran ini. Di sisi lain, terdapat gagasan bersama seputar identitas Italia, budaya politik, dan citra diri, terutama yang menekankan pada pasifisme dan pandangan kritis terhadap dominasi AS. Peran Italia, berbeda dengan banyak negara lainnya, menghadapi ketidakpastian dan krisis karena adanya pendorong perilaku yang menunjukkan arah yang

berlawanan, seringkali mencari jalan diplomasi inovatif untuk mengatasi dilema ini (Brighi & Giusti, 2023).

Akibatnya, sementara pembuat kebijakan luar negeri Italia hari ini menekankan komitmen Italia pada multilateralisme - terwujud dalam keanggotaannya di UE, NATO, dan PBB - realitas lanskap kebijakan luar negeri Italia jauh lebih kompleks. Di dalamnya, kecenderungan yang bertentangan dan kadang-kadang sentrifugal berdampingan, menjadi tantangan yang berkelanjutan sejak pemerintahan Draghi mulai berkuasa (Brighi & Giusti, 2023).

Hal yang menjadi kelemahan Italia terdapat dalam hal keselarasan yang tegas dengan kebijakan energi dan militer yang digarap oleh UE dan AS, pemerintahan Draghi berusaha untuk mengkompensasinya dengan aktivitas diplomasi dan politik yang sangat keras berpusat pada dua pilar: dukungan untuk keanggotaan UE Ukraina, dan rencana perdamaian. Aktivitas ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat di dalam negeri, karena bertujuan untuk menenangkan bagian dari masyarakat yang menentang dukungan militer untuk Ukraina dan tidak puas dengan efek negatif dari sanksi bagi negara-negara Eropa. Meskipun begitu pada akhirnya, terdapat banyak sekali data yang menunjukkan bahwa posisi Draghi dan hubungannya dengan AS, NATO, dan Uni Eropa justru tidak didukung oleh publik. Maka dari itu, merespons hal ini pemerintahan Italia yang baru dibawah kepemimpinan Meloni hendak berupaya menjamin keberlanjutannya, namun dengan pendekatan yang berbeda dari pemerintahan Draghi.

Meskipun begitu, Meloni kerap menegaskan idenya sekaligus mengkritik Uni Eropa sembari menjalankan komitmen keberlanjutan hubungan Italia-Uni Eropa. Meloni menekankan perspektifnya tentang UE, melihatnya bukan sebagai "klub eksklusif dengan tingkatan keanggotaan yang berbeda, atau bahkan sebagai entitas korporat yang hanya fokus pada urusan keuangan. Sebaliknya, dia melihat Uni Eropa sebagai rumah bersama bagi bangsa-bangsa Eropa, yang ditugaskan untuk menghadapi tantangan-tantangan kontemporer yang melampaui kapasitas Negara-Negara Anggota individual. Ini termasuk perjanjian perdagangan, pasokan sumber daya, kebijakan migrasi, keputusan geopolitik, dan upaya penanggulangan terorisme—bidang-bidang di mana UE belum secara konsisten menunjukkan kesiapan." (Baraggia, 2023). Menyoroti kekurangan UE, Meloni menguraikan peran yang diinginkan oleh pemerintahnya: "Kami bertujuan untuk integrasi yang lebih kokoh untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dengan menghormati prinsip inti 'Bersatu dalam keragaman.'" (Baraggia, 2023).

Dalam ranah migrasi, Italia mendapati dirinya berjuang menghadapi lonjakan kedatangan tanpa izin melalui jalur Tengah Mediterania. Pada bulan Juni, Meloni berusaha untuk menunjukkan optimisme dengan menyatakan bahwa Eropa akhirnya mengatasi dimensi eksternal migrasi, yang menurutnya sebelumnya "tak terpikirkan" (Pemerintah Italia, 2023a). Namun, pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa pendekatan ini tidak baru, mengingat perjanjian UE-Turki tahun 2016 pada puncak krisis migrasi. Uni Eropa secara konsisten gagal mengatasi migrasi secara komprehensif, memilih pendekatan transaksional yang memindahkan tanggung jawab kepada negara-negara asal dan transit (Dewan Eropa, 2016). Negara-negara ini diharapkan dapat mengelola, menerima kembali, atau repatriasi migran sebagai imbalan dukungan ekonomi, suatu strategi yang terbukti tidak efektif.

Meskipun ada perjanjian yang optimis, implementasi praktis seringkali tidak sesuai harapan. Nota kesepahaman UE-Tunisia yang ditandatangani pada bulan Juli adalah contoh nyata, dengan kedatangan dari Tunisia ke Italia melonjak hampir 60 persen dalam delapan minggu setelah perjanjian tersebut (Ziniti, 2023). Selain itu, upaya anggota Parlemen Eropa untuk memantau situasi di Tunisia baru-baru ini ditolak (O'Carroll, 2023). Pem emphasis Meloni pada dimensi eksternal kebijakan migrasi UE mencerminkan kegagalan Italia untuk membuat kemajuan di tingkat internal, bahkan dengan adanya kesepakatan yang kurang

mantap mengenai Pakta Baru tentang Migrasi dan suaka pada awal Juni, yang mendapat penolakan keras dari sekutu di Polandia dan Hungaria.

Lanskap kebijakan ekonomi memberikan serangkaian tantangan lain bagi Italia. Dengan keterbatasan fleksibilitas fiskal, Italia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan setiap pelonggaran aturan bantuan negara. Oleh karena itu, Roma mendukung pendirian dana kedaulatan Eropa baru sebagai landasan kebijakan industri UE secara keseluruhan (Pemerintah Italia, 2023b). Namun, skeptisisme dari negara-negara anggota lain dan kesulitan Italia dalam menggunakan dana NextGenerationEU yang sudah ada merugikan kredibilitasnya. Rencana ambisius untuk mendirikan dana baru telah dipangkas secara signifikan, dengan pembentukan "platform" pada teknologi strategis (Strupczewski, 2023). Memperumit masalah adalah perundingan berkelanjutan untuk Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan yang baru, di mana perlawanan Jerman terhadap proposal Komisi Eropa menghambat prospek Italia untuk mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar.

Prioritas Italia seharusnya adalah membentuk front bersatu sejalan dengan proposal Komisi, yang potensial melibatkan negara-negara anggota seperti Spanyol dan Prancis. Namun, pertikaian internal mengenai ratifikasi Mekanisme Stabilitas Eropa dan kampanye untuk mengesampingkan jenis investasi publik tertentu dari target defisit UE melemahkan posisi negosiasi Italia. Ada kekhawatiran nyata bahwa Pakta baru mungkin tidak memenuhi harapan dan kebutuhan Italia, membahayakan prospek ekonomi negara dalam UE (Strupczewski, 2023).

Saat Italia berjuang menghadapi tantangan ini, pemerintahan Meloni harus menavigasi medan yang kompleks, seimbangkan dinamika internal dengan negosiasi eksternal. Jalan ke depan membutuhkan diplomasi strategis, komunikasi yang efektif, dan pendekatan pragmatis untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks yang dihadapi negara. Dalam membentuk masa depan Italia di dalam UE, pemerintahan Meloni harus mendamaikan prioritas domestik dengan tuntutan dan harapan rekan-rekannya di Eropa. Narasi yang berkembang akan menjadi penentu penting dari posisi Italia dalam UE, mempengaruhi perannya dalam bidang migrasi dan kebijakan ekonomi. Kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan ini secara bersamaan akan menentukan lintasan Italia dalam lanskap hubungan UE yang kompleks.

Sejauh ini, Meloni memang cenderung terkesan mengambil posisi yang sangat hati-hati terhadap Uni Eropa. Meloni juga cenderung memutuskan untuk mengikuti dan melanjutkan jejak Mario Draghi selaku pemerintah sebelumnya, untuk menunjukkan peran Italia yang masih dapat diandalkan oleh pihak Uni Eropa. Meskipun begitu, penting untuk dipahami bahwasannya terlepas dari perilaku tersebut, Meloni akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Hal ini dikarenakan ia cenderung ingin membangun kerangka dukungan yang kokoh baik dari masyarakat Italia maupun masyarakat global. Lebih jauh, Italia akan menerima lebih dari 200 miliar Euro pada 2023 sebagai hibah dan pinjaman dari pihak Uni Eropa. Dana tersebut tentunya akan sangat berguna bagi pemulihan Italia selama masa perang, ini menjadi sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Meloni (Baraggia, 2023).

Respon Uni Eropa terhadap Kepemimpinan Meloni

Penunjukan Giorgia Meloni sebagai Perdana Menteri Italia tahun lalu menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan, terutama dalam Uni Eropa (UE). Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, bahkan memberikan peringatan kepada Italia, menyiratkan "konsekuensi" potensial jika negara tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi (Jucca, 2023). Namun, bertentangan dengan skeptisisme awal, Meloni telah mengecewakan harapan, menunjukkan kepemimpinan yang sejalan dengan standar demokratis dan regulasi UE. Menanggapi kekhawatiran tentang komitmen Italia terhadap NATO, Meloni menjadikan

itu sebagai prioritas untuk memberikan jaminan kepada sekutu asing. Sikap tegasnya, terutama dalam menghadapi agresi Rusia di Ukraina, menandai perbedaan dari pendekatan yang diantisipasi oleh Eropa. Dalam pidato perdananya di parlemen, Meloni dengan tegas menyatakan, "menyerah pada pemerasan Putin terkait energi tidak akan menyelesaikan masalah" (ibid).

Munculnya Meloni sebagai pemimpin yang berjaya melihatnya melepaskan diri dari bayang-bayang pemimpin sebelumnya dan menegaskan kemandiriannya. Memperkuat hubungan diplomatik dengan Eropa, ia dengan cepat mengunjungi Brussels dan terlibat dalam pertemuan dengan pejabat UE setelah menjabat. Analisis politik Massimo Franco menyoroti kemenangan Meloni atas Salvini dan Berlusconi, menjadikannya penjamin konstitusi (D'emilio, 2023).

Masuk tahun kedua sebagai Perdana Menteri, pemerintahan Meloni menjadi fokus kebijakan internal terkait imigrasi dan regulasi ekonomi. Tahun pertama menyaksikan upaya reformasi konstitusional untuk meningkatkan stabilitas pemerintah. Namun, kritik, terutama dalam bidang kebijakan luar negeri, tetap ada. Italia terus berjuang dengan pemerintahan yang sementara, menjadikan suara percaya pemerintah dan dukungan publik sebagai indikator penting dalam upaya mencapai stabilitas di bawah kepemimpinan Meloni.

Latar belakang politik Meloni dan akar partainya mengandung unsur-unsur nostalgia dari Benito Mussolini, namun ia menegaskan bahwa mereka mewakili visi yang sangat berbeda. Pernyataan Meloni mengenai peristiwa di Roma yang diduduki oleh Nazi mencerminkan upaya sadar untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sejarah. Hasil jajak pendapat opini publik secara konsisten menunjukkan dukungan populer yang signifikan untuk Meloni. Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri, ia secara konsisten menduduki posisi teratas dalam jajak pendapat, meraih hampir 30% suara dibandingkan dengan 26% partainya dalam pemilihan 2022 (D'emilio, 2023). Namun, kritik tetap ada, mendorong Meloni untuk berjanji akan reformasi konstitusional yang memungkinkan pemilihan langsung perdana menteri oleh pemilih, dengan harapan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.

Meskipun reformasi konstitusional yang diusulkan oleh Meloni memiliki potensi untuk membawa perubahan substansial dalam lanskap politik, kemungkinan besar akan menghadapi berbagai kritik. Para kritik berpendapat bahwa pergeseran seperti itu dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang delikat dan menciptakan tantangan dalam pembentukan pemerintahan koalisi. Debat berkelanjutan seputar reformasi konstitusional menambah kompleksitas agenda politik Meloni.

Dalam konteks ini, kebijakan masa depan di bawah kepemimpinan Meloni dan dampaknya pada publik akan memainkan peran sentral dalam membentuk lintasan politik Italia. Kemampuan pemerintah untuk menanggapi kritik, menavigasi diskusi konstitusional yang rumit, dan menjaga dukungan publik akan menjadi faktor penentu dalam menentukan arah politik Italia. Dinamika kepemimpinan Meloni, yang ditandai dengan ketangguhan dan responsif, tanpa ragu akan meninggalkan jejak abadi dalam lanskap politik Italia, membentuk lintasan negara itu dalam Uni Eropa dan panggung global. Saat pemerintah menghadapi tantangan di tahun kedua, narasi yang berkembang di bawah bimbingan Meloni akan membentuk posisi dan pengaruh Italia dalam lanskap geopolitik yang kompleks di UE.

Dampak Meloni Effect: Politik Sayap Kanan Merajalela di Uni Eropa?

Di berbagai penjuru Eropa, terlihat adanya pergeseran menuju politik sayap kanan, dengan pemimpin sayap kanan mengambil alih kekuasaan di beberapa daerah, partai tengah-kanan tradisional membentuk aliansi dengan fraksi sayap kanan yang sebelumnya dihindari, dan partai sayap kanan keras mendapatkan pengaruh di parlemen dan kantor-kantor regional. Tren ini telah diamati di beberapa negara, termasuk Jerman, di mana partai Alternative for

Germany (AfD), yang sudah diawasi karena dugaan ekstremisme sayap kanan, baru-baru ini mencapai kesuksesan mencolok, melampaui Partai Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz dan memenangkan pemilihan distrik yang signifikan (Arzheimer & Berning, 2019; Lynch, 2023).

Kemunculan Perdana Menteri sayap kanan Giorgia Meloni di Italia tidak memulai tren ini, tetapi tahun lalu telah menyaksikan serangkaian kemenangan mencolok bagi kekuatan konservatif. Tren ini tidak terbatas pada Italia, karena negara-negara lain seperti Spanyol dan Slovakia tampaknya siap untuk bergerak ke arah kanan dalam pemilihan mendatang (Lynch, 2023). Lanskap politik di Eropa telah mengalami transformasi yang signifikan, seperti yang terlihat selama pertemuan puncak pemimpin UE di Brussels, dimana Petteri Orpo, perdana menteri baru Finlandia dan pemimpin Partai Koalisi Nasional konservatif, mewakili pergeseran ke kanan di negaranya. Finlandia, setelah mengalami empat tahun pemerintahan koalisi yang condong ke kiri, beralih ke pemerintahan paling kanan dalam sejarahnya karena perubahan preferensi pemilih (Guillot, 2023).

Yunani juga menyaksikan kemenangan untuk pemimpin tengah-kanan Kyriakos Mitsotakis, yang meraih mayoritas yang signifikan dalam pemilihan nasional, mencerminkan tren kenaikan kekuatan sayap kanan secara umum. Komposisi pemimpin di sekitar meja UE, terutama di Dewan Eropa, memiliki signifikansi karena membentuk prioritas politik dan inisiatif kebijakan UE. Seorang diplomat senior UE mencatat "efek Meloni" di Dewan, menunjukkan pergeseran ke posisi sayap kanan dalam isu-isu seperti migrasi dan iklim (Lynch, 2023).

Pengaruh Meloni dan rekan-rekan sayap kanannya dapat meluas ke Parlemen Eropa, di mana pemilihan mendatang dapat menghasilkan keuntungan substansial bagi partai konservatif. Partai Rakyat Eropa (EPP), yang sudah menjadi keluarga politik terbesar di Parlemen, berpotensi mendapatkan keuntungan, bersama dengan kelompok Konservatif dan Reformis Eropa (ECR), yang menampilkan Meloni dan partai Hukum dan Keadilan Polandia. Kelompok ECR bisa menjadi kekuatan sentral, dengan anggota parlemen sentris dan tengah-kanan mencari dukungannya untuk mendorong agenda mereka. Ini mencerminkan tren yang semakin tumbuh dalam politik nasional, di mana partai konservatif tradisional bersedia bersekutu dengan elemen sayap kanan jauh (Vincour, 2023).

KESIMPULAN

Kepemimpinan Giorgia Meloni di Italia telah membawa masuk era yang kompleks dan kontroversial dalam hubungan negara tersebut dengan Uni Eropa. Pendekatan kepemimpinan Giorgia Meloni, yang berakar pada nilai-nilai tradisional, persatuan nasional, dan kewenangan yang kredibel, tidak hanya membentuk politik domestiknya tetapi juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Italia, sejalan dengan komitmennya yang kuat terhadap kedaulatan nasional dan kehadiran global yang kuat. Meskipun narasinya bersifat nasionalis, Meloni telah menunjukkan pemahaman yang nuansa terhadap posisi Italia dalam UE, menekankan perlunya integrasi yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan global kontemporer.

Posisi Italia dalam berbagai kebijakan UE, termasuk migrasi dan kerja sama ekonomi, memerlukan navigasi yang hati-hati di bawah kepemimpinan Meloni. Tantangan yang dihadapi oleh dinamika politik internal, pengaruh yang bertentangan pada strategi diplomasi, dan keseimbangan yang delik antara prioritas nasional dan kolaborasi UE menuntut diplomasi strategis dan komunikasi yang efektif.

Pendekatan hati-hati Meloni terhadap UE mencerminkan komitmennya untuk menjaga Italia sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam komunitas Eropa. Meskipun adanya kekhawatiran awal dari pemimpin UE, Meloni telah menunjukkan sikap yang pragmatis dan kooperatif, terutama dalam mengatasi krisis di Ukraina dan mengukuhkan komitmen Italia terhadap NATO.

Dampak kepemimpinan Meloni, yang umumnya disebut sebagai "Meloni Effect" meluas di luar batas Italia, berkontribusi pada tren lebih luas dari politik sayap kanan yang semakin menonjol di UE. Munculnya kekuatan konservatif di berbagai negara Eropa menandakan pergeseran dalam lanskap politik, dengan partai sayap kanan tengah tradisional membentuk aliansi dengan faksi sayap kanan jauh yang sebelumnya dihindari.

Saat Italia menavigasi tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan Meloni, menjadi krusial bagi pemerintah untuk menyeimbangkan prioritas domestik dengan harapan dan aspirasi mitra Eropa. Naratif yang berkembang di bawah bimbingan Meloni akan memainkan peran sentral dalam membentuk posisi Italia dalam lanskap geopolitik kompleks UE.

REFERENSI

- Baraggia, A. (2023). The Italian right-wing government and the EU: An interesting case study. *The Italian Review of International and Comparative Law*, 3(1), 207–213. doi:10.1163/27725650-03010014
- Birinci, S. (2023). Retrieved from <https://www.ankasam.org/the-meloni-era-and-its-future-in-italy/?lang=en>
- Brighi, E., & Giusti, S. (2023). Italian diplomacy and the Ukrainian crisis: The challenges (and cost) of Continuity. *Contemporary Italian Politics*, 15(2), 190–204. doi:10.1080/23248823.2023.2195776
- Cilento, C. (2023). Communication and politics: Giorgia Meloni, a prime minister between pop propaganda and Nationalism. *Advances in Journalism and Communication*, 11(02), 172–186. doi:10.4236/ajc.2023.112012
- D'emilio, F. (2023, October 18). Italy's far-right Premier Meloni defies fears of harming democracy and clashing with the EU. AP News. <https://apnews.com/article/italy-meloni-farright-migrants-2b3fc3bb92058eff65a7b38fa639693c>
- Elisabetta Brighi & Serena Giusti (2023) Italian diplomacy and the Ukrainian crisis: the challenges (and cost) of continuity, *Contemporary Italian Politics*, 15:2, 190-204, DOI: 10.1080/23248823.2023.2195776
- Guillot, L. (2023, June 18). Petteri Orpo to be Finland's new prime minister. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/finland-petteri-orpo-prime-minister-national-coalition-party-parliament-election/>
- Habermas, J. (1962). *Strukturwandel der Öffentlichkeit*. Luchterhand.
- Italian Government. (2023, February 10b). President Meloni's Introduction at Her Press Conference following the Special European Council Meeting. <https://www.governo.it/en/node/21805>
- Italian Government. (2023, June 30a). President Meloni's Doorstep Following the European Council Meeting of 29-30 June. <https://www.governo.it/en/node/23062>
- Jucca, L. (2023). Retrieved from <https://www.reuters.com/breakingviews/melonis-italian-job-is-lesson-eus-right-2023-09-26/>
- Lynch, S. (2023, June 30). Europe Swings Right — and Reshapes the EU. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/far-right-giorgia-meloni-europe-swings-right-and-reshapes-the-eu/>
- Mazzoleni, G. (2012). *La comunicazione politica*. Il Mulino.
- Mazzoleni, G., & Bracciale, R. (2019). *La politica pop online*. I meme e le nuove sfide della co-municazione politica. Il Mulino.
- O'Carroll, L. (2023, September 14). MEPs Refused Entry to Tunisia Two Months after Signing of Migration Deal. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/p/zq9me>.
- Politico. (2023, June 27). Pressure grows on von der Leyen to defy her party and defend EU Green Deal. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/conservatives-closer-to-killing-eu-nature-law-risk-internal-split/>

- Strupczewski, J. (2023, January 27). Seven EU Countries Oppose New EU Funding as Response to U.S. Subsidy Plan – Letter. Reuters. <http://reut.rs/3Jgftt6>
- Vincour, N. (2023, January 24). Europe’s conservatives want a piece of Giorgia Meloni. POLITICO. <https://www.politico.eu/article/far-right-italy-giorgia-meloni-europe-conservatives-want-a-piecem/news/world-middle-east-29052144>.
- Ziniti, A. (2023, September 14). L’intesa flop con la Tunisia, sbarchi aumentati del 60%. Salvini: è un atto di guerra. Repubblica.